



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2027



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

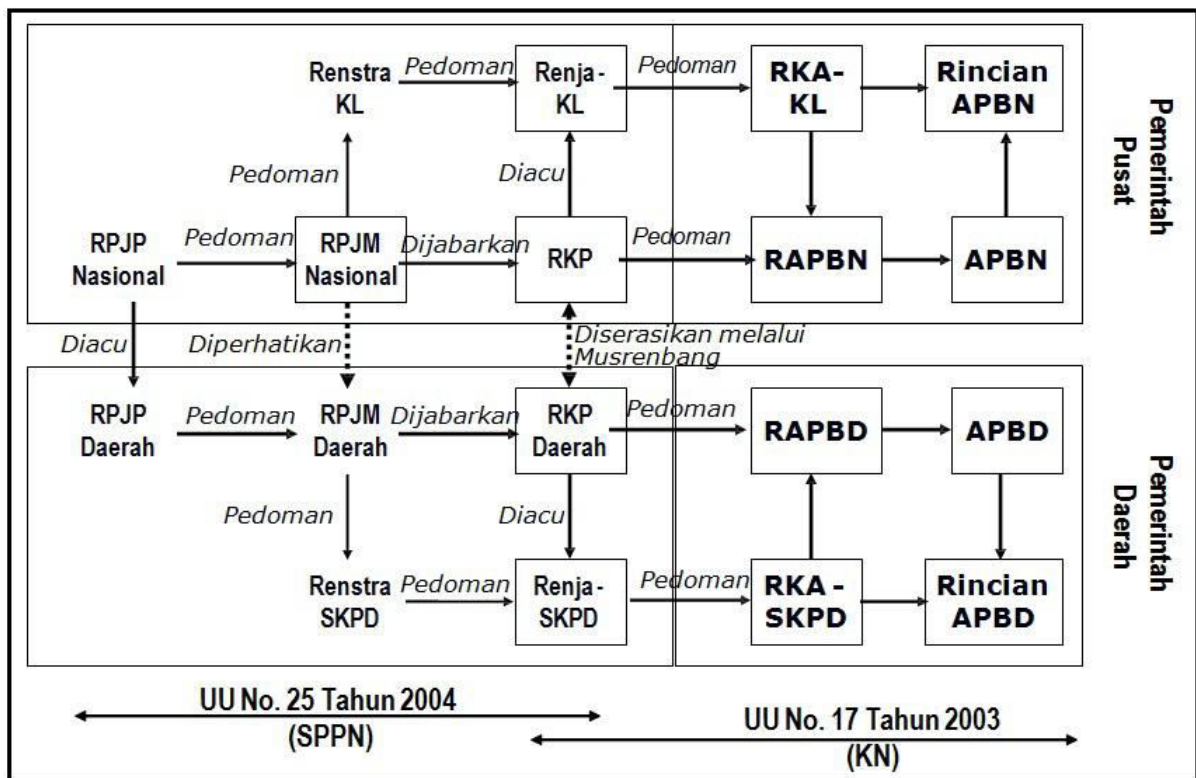
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	85	85,43	85	83,60 (Memuaskan)	98,30	83,60 (Memuaskan)	99,42
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	18	100
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	100
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	16	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	32 Orang/ Bulan	61 Orang	35 Orang	35 Orang	100	96	104,68
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	120 Orang	80 Orang	80 Orang	100	200	116,67
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	4	200
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14 Paket	5 Paket	5 Paket	100	19	175
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	27 Paket	2 Paket	2 Paket	100	29	100
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12 Paket	5 Paket	5 Paket	100	17	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	18	100
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	15	100
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	21	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	28 Unit	14 Unit	14 Unit	100	42	100
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	244 Unit	122 Unit	122 Unit	100	366	100
	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	3	100
	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100
	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	
	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	0*)Perubahan nomenklatur di SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	2 Peta Potensi	100	4	50
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Kabupaten/Kota							
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3	100
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	17,79 persen	22,87 persen	15,29 persen	20,92 persen	136,82	21,895	171,18
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4	100
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6	125
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	87,11	86	87,75	102,03	87,75	102,55
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3000 legalitas	3867 legalitas	3000 legalitas	4619 legalitas	153,96	8486	141,43
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	1900 pelaku usaha	5.479 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	4236 pelaku usaha	235,33	6983	188,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
7	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2200 kegiatan usaha	3607 kegiatan usaha	2100 kegiatan usaha	4236 kegiatan usaha	201,71	7843	181,87
	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	900 Orang	2000 Orang	850 Orang	1220 Orang	143,53	3220	
	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1857 pelaku usaha	-	-	-	1857	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 perusahaan	62 perusahaan	8 perusahaan	28 perusahaan	350	90	100
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	124 Kegiatan Usaha	140 Kegiatan Usaha	-	-	-	140	
	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		62 kegiatan usaha	122 kegiatan usaha	126 kegiatan usaha	103,28	188	1175
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0						
	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan		790 pelaku usaha	120 pelaku usaha	120 pelaku usaha	100	910	291

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0							
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		66 kegiatan usaha	14 kegiatan usaha	28 kegiatan usaha	200	94	167,85
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	2 database	2 database	-	-	-	2	-
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	2 jenis	-	2 jenis	-	-	2	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) atau(9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	6	100
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100	100	100	100	100	100	100
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	100

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	85,10	83,60 (Memuaskan)	83,90	83,90	100	83,90	98,23
		IKM	88,51	88	88,11	88,11	100	88,11	99,42
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6	100
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	100
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100	35	100
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	400 orang	60 orang	80 orang	80 orang	100	80	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	4	20
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	10	20
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	4	20
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	10	20
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	12	20
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	10	20
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	14	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24	20
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100	14	100
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	122 unit	122 unit	122 unit	100	122	100
	Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1	20
	Kegiatan Penataan Organisasi								
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Proyek	6 persen	na	2 persen	2 persen	100	2 persen	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota							
	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2	40
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	6,20	24,23	5,80	5,80	100	5,80	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	100
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	6	40
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	95,3 persen	99,6 persen	99,10 persen	99,10 persen	100	99,10	95,6
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.300 pelaku usaha	4236 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	1900 pelaku usaha	100	6.136	54,3
	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	13.100 kegiatan usaha	4236 kegiatan usaha	2200 kegiatan usaha	2200 kegiatan usaha	100	6.436	49,13
	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui	5.600 Pelaku usaha	1220 Pelaku usaha	950 Pelaku usaha	950 Pelaku usaha	100	2170	38,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	22 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	8	36,36
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	27 persen	22 persen	23 persen	23 persen	100	23 persen	85,19
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	742 kegiatan usaha	126 kegiatan usaha	124 kegiatan usaha	124 kegiatan usaha	100	250	33,69
	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1.438 pelaku usaha	120 pelaku usaha	240 pelaku usaha	240 pelaku usaha	100	360	25,03
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta	178 kegiatan usaha	28 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	100	58	32,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7) (9)=(7)	(10)=(9)/(4)
		Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	4	33,33
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100
	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2	200

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Adanya penyesuaian implementasi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP dengan dinamika regulasi pusat berdampak pada penyelenggaraan layanan publik yang inkonsisten karena standar pelayanannya secara simultan masih berproses;
 - b. Penyesuaian mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada keterlambatan penyediaan sarana pendukung penyelenggaraan layanan publik;
 - c. Penyesuaian jadwal dan tahapan kegiatan dengan stakeholder berdampak pada ketidaksesuaian realisasi target ROPK Keuangan dan ROPK Fisik.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Komitmen segenap anggota tim kerja sehingga peforma kinerja terus meningkat;
 - b. Terbangunnya koordinasi dan mekanisme kerja yang efektif antarbidang serta dengan perangkat daerah dan stakeholder;
 - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi secara berkelanjutan akan semakin memberi dampak yang baik dalam pelayanan ke masyarakat;

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi dengan *stakeholder*;

2. Mengembangkan inovasi di berbagai bidang termasuk di bidang teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tupoksi OPD;
3. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang penanaman modal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU dan IKK Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
a.	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.193.856.422.696,05	2.881.147.742.696,05	3.608.270.501.500,05	4.363.137.212.555,05	3.965.123.195.297,05	3.110.555.493.366,36	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. IKM Kinerja PTSP	Nilai Angka	87	88,84	87,11	88,78	88	86,25	-
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Pertumbuhan nilai investasi	persen	28,49	31,33	25,24	20,92	11,78	14	15,67
	b. Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	486.37	687.29	727.12	754.86	425	532,04	758
III.	IKK sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase peningkatan investasi	Persen	3,31	41,30*)	5,80	3,82	5,01	5,04	5,07

*) Adanya dukungan DAK Fasilitas Penanaman Modal dan perhitungan sesuai formulasi hasil desk LPPD dengan Tim Kemendagri

Sesuai pencapaian IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
 - a. IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
 - b. IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Indikator IKK yang tidak dapat memenuhi target adalah Persentase peningkatan investasi;
 IKK tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh faktor diluar kendali Perangkat Daerah di tahun n. Penambahan modal oleh pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sulit diprediksi dari tahun ke tahun karena beberapa faktor, seperti:
 - Kondisi ekonomi yang tidak stabil;
 - Perubahan kebijakan pemerintah;
 - Perkembangan teknologi dan inovasi;
 - Perubahan permintaan pasar;

Semua faktor itu mempengaruhi keputusan investasi dan penambahan modal pelaku usaha sehingga berdampak pada turun naiknya capaian peningkatan investasi pada periode pencatatan/pelaporan LKPM dari tahun ke tahun .

3. Indikator IKU yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Pertumbuhan nilai investasi
- b. Realisasi nilai investasi (PMDN + PMA) Tahun n

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui implementasi kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU dan IKK yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Melakukan Promosi yang Efektif dengan terus melakukan promosi investasi untuk menarik investasi di berbagai sektor;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha perizinan;
4. Mengembangkan Inovasi yang lebih berdampak langsung ke Masyarakat;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi
Landasan hukum kelembagaan dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi perizinan dan penanaman modal di kalangan aparatur maupun pemangku kepentingan
Inovasi yang dikembangkan secara berkelanjutan	Ketersediaan sarana dan prasarna pendukung pelayanan belum memadai
Implementasi sistem online dan digitalisasi proses perizinan	Literasi digital Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan layanan elektronik masih perlu ditingkatkan

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi	Perubahan peraturan dan kebijakan yang dinamis
Dukungan transformasi digital melalui kebijakan SPBE, OSS-RBA, dan pelayanan publik berbasis elektronik	Tuntutan percepatan digitalisasi pelayanan publik yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan dan berkualitas
Dukungan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi	Perbedaan persepsi terhadap implementasi regulasi antar sektoral

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam mendorong investasi;
2. Mendorong optimalisasi penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses perizinan serta meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
3. Mengembangkan inovasi yang adaptif dan berdampak pada investor/pelaku usaha dan Masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, berintegritas dan semangat melayani

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,20	5.973.100.946	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,2	6.666.049.016,39	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,21				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,21		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertumbuhan Proyek	3 persen	260.150.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertumbuhan Proyek	3 persen	18.350.000,00	
	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	5,9 persen	520.341.800	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	5,9 persen	35.230.000,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	93,8 persen	459.371.000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99,2	37.819.900,00	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	24 persen	473.260.700	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	24 persen	38.600.000,00	
	Program Pengelolaan Data Dan		Persentase pemanfaatan data	100 persen	128.840.800	Program Pengelolaan Data Dan Sistem		Persentase pemanfaatan data	100 persen	8.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sistem Informasi Penanaman Modal		dan informasi penanaman modal			Informasi Penanaman Modal		dan informasi penanaman modal			
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	150.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100 persen	146.691.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Catatan
1	Bimtek Pendampingan penerbitan Legalitas Usaha/NIB bagi pelaku usaha	Tirtohargo Kretek	1	Paket	

Usulan tersebut selaras dengan implementasi inovasi OPD, yakni GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan secara Langsung) yang merupakan salah satu aktivitas kegiatan pada kegiatan Subkegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Keunggulan inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan secara Langsung) antara lain :

- a. Jangka waktu penyelesaian izin kurang dari 1 jam
- b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun, juga berkolaborasi dengan Bank BRI dan BPD DIY, serta instansi vertikal BBPOM DIY.
- c. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/komunitas dengan waktu menyesuaikan/fleksibel.
- d. Mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke Lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Manfaat Inovasi Gampil ini berdampak pada masyarakat menjadi sadar berizin dalam melakukan usahanya dan terjadi perubahan mindset bahwa mengurus izin itu adalah mudah (bahasa Jawa halus : gampil).

Output inovasi ini adalah :

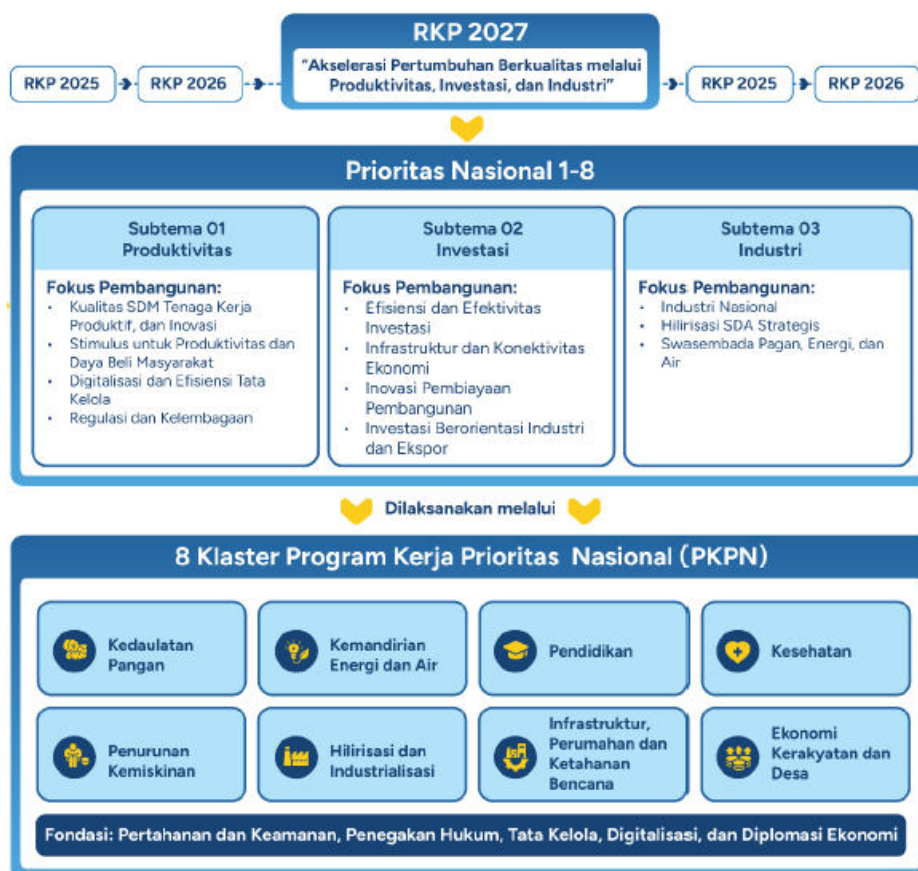
- Menerbitkan Izin usaha/NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam satu jam;
- Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk sadar berizin untuk usahanya;
- Meminimalisir pengurusan izin lewat calo;
- Mendekatkan pelayanan izin kepada pemohon Izin (daerah-daerah pelosok, minus teknologi dan kantong kemiskinan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi Masyarakat;
- Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai nilai-nilai budaya pemerintahan .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan deregulasi kebijakan yang mendukung kemudahan investasi;
2. Peningkatan Strategi promosi investasi;
3. Optimalisasi Kolaborasi upaya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP;
5. Optimalisasi pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Sinkronisasi Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi	persen	20,92 persen	14 persen	15,67 persen
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n milyar rupiah	milyar rupiah	754,8 milyar rupiah	566,42 milyar rupiah	758 milyar rupiah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 tersebut, juga mendukung salah satu program unggulan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha muda serta pembangunan kawasan industri.**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.950.989.916,39							6.950.298.864,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.804.298.916,39							6.808.873.826,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.804.298.916,39							6.808.873.826,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.666.049.016,39						-	6.006.468.206,00	
		[Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.51		88.11	88.21	6.664.249.016,39	-	-	-	-	-	88.31	5.985.393.206,00	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85.10		83.90	84.20							84.50		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.250.000,-			-		-	-	18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.650.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.396.885.300,39			-	-	-	-	4.570.134.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.328.725.300,39	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	35 Orang/bulan	4.501.374.521,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.160.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	68.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.700.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		80 Orang	60 Orang	13.700.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	80 Orang	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	409.881.992,00			-	-	-	-	401.622.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.494.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	2 Paket	16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	196.604.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Paket	96.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	36.284.992,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	2 Paket	49.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.933.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Paket	59.520.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	3. Mewujudkan transformasi	-	6 Dokumen	8.250.000,00	DINAS PENANAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan							UMUM (DAU)	industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.240.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	26.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.585.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	127.802.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	14.241.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	5 Dokumen	9.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	7 Dokumen	9.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	615.408.824,00			-	-	-	-	294.711.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.370.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.794.600,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	578.044.224,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Laporan	217.521.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.222.900,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	98.417.900,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	14 Unit	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit		122 Unit	122 Unit	41.045.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	122 Unit	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	79.760.000,00	Kab. Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	5.700.000,00			-	-	-	-	242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	12 Dokumen	242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	18.350.000,00						-	39.448.939,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Pertumbuhan Proyek	6.00 %		2.00 %	3.00 %	15.350.000,00	-	-	-	-	-	4.00 %	39.448.939,00	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.350.000,00			-	-	-	-	19.724.469,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kabupaten/Kota														
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	46.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	37.819.900,00						-	411.465.460,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan]	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99,50		99,10	99,20	25.819.900,00	-	-	-	-	-	99,30	411.465.460,00	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	37.819.900,00			-		-	-	411.465.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	4 Dokumen	36.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1900 Pelaku Usaha		1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	19.819.900,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1900 Pelaku Usaha	78.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	950 Pelaku Usaha		950 Pelaku Usaha	950 Pelaku Usaha	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	950 Pelaku Usaha	253.681.460,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.00 09	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2200 Kegiatan Usaha	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		42.834.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	38.600.000,00						-	79.234.997,00	
		[Meningkatkan pelaku usaha/investor tertib LKPM]	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	27%		23%	24%	38.600.000,00	-	-	-	-	-	25%	79.234.997,00	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	38.600.000,00			-	-	-	-	79.234.997,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	21.800.000	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	240 Pelaku Usaha	24.225.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal														
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	32 Kegiatan Usaha	6.600.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	30 Kegiatan Usaha	44.384.997,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.00 07	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				124 Kegiatan Usaha	10.200.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		10.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	8.250.000,00						-	141.425.038,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100		100	100	8.250.000,00	-	-	-	-	-	100	141.425.038,00	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.525.000,00			-	-	-	-	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	41.525.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-		141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						146.691.000,00							141.425.038,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						146.691.000,00							141.425.038,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	146.691.000,00						-	141.425.038,00	
		[Meningkatkan implementasi budaya inovasi pemerintahan]	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	100		100	100	146.691.000,00	-	-	-	-	-	-	141.425.038,00	-
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	146.691.000,00			-	-	-	-	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.00 01	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten/Kota														
		Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	146.691.000,00	Kab. Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	1 Dokumen	141.425.038,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							6.950.989.916,39							6.950.298.864,00	

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

